

PROFESI INFORMASI DAN PENDIDIKAN PENDUKUNGNYA

Makalah Kuliah Umum, YARSI, Rabu 8 November 2017

Putu Laxman Pedit, Ph.D.

Kebutuhan Tenaga Kerja bidang Informasi

Dua *screenshots* berikut ini merupakan dua lowongan kerja di situs *jobstreet*¹ dan *linkedin* yang memberikan gambaran tentang kebutuhan *data analyst*.

Kriteria:

- Bertanggung jawab untuk meninjau data, Interpretasi, analisis dari data yang dikumpulkan menggunakan alat yang berbeda, teknik statistik seperti Word, MS Excel, Power Point, Grafik analisis dan data sistem manajemen untuk memberikan akurat & handal laporan kepada perusahaan
- Data analyst juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan presentasi, melakukan penelitian, dan mempertahankan kualitas sistem database. Data analyst membantu dalam administrasi database, Desain, keamanan juga tepat waktu pemeliharaan basis data.
- Data analyst bertanggung jawab untuk mempersiapkan berbagai statistik laporan operasional harian, bulanan, triwulanan dan tahunan.
- Data analyst harus berinteraksi secara individual dengan klien perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi dan penelitian.
- Data analyst harus tepat waktu dan memiliki keterampilan manajemen waktu.
- Data analyst harus memiliki keterampilan manajemen proyek mempertimbangkan semua aspek perencanaan, pengorganisasian dan koordinasi proyek dengan para pemangku kepentingan.
- Harus menjadi peserta aktif, motivasi diri, cepat, dan orang yang inovatif.

Kualifikasi :

- Candidate must possess at least a Diploma, Bachelor's Degree, Economics, Finance/Accountancy/Banking, Business Studies/Administration/Management, Marketing or equivalent.
- At least 2 year(s) of working experience in the related field is required for this position.
- Applicants must be willing to work in Sunter, Jakarta Utara.
- Preferably Staff (non-management & non-supervisor)s specializing in Marketing/Business Development or equivalent.

LinkedIn

Deskripsi pekerjaan

web and digital analytics

Memahami dunia digital Web, sosmed atau portal

Pengumpulan data dan pemasukan data

Analisis data yang berkaitan dengan website

Pengalaman menggunakan paket statistik untuk menganalisis data (Ms. Excel)

Pengalaman Web Analytics yang sangat baik (sebaiknya Google Analytics)

Keterampilan analisis yang kuat, perhatian besar terhadap detail,

dan kemampuan komunikasi yang baik

Kedua iklan ini memberikan gambaran sekilas tentang keahlian mengolah data yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Keduanya menunjukkan pula sebuah *trend* di bidang informasi yang oleh sebuah situs analisis kerja disebut-sebut sebagai “keahlian yang paling dibutuhkan saat ini di Indonesia”², yaitu *data analyst*, dengan kemampuan mengolah data ‘mentah’ kemudian menganalisa serta menginterpretasinya menjadi informasi terstruktur untuk membantu perusahaan mengambil keputusan. Profesi ini diproyeksikan tumbuh antara 3% – 7% hingga tahun 2022.

Pertumbuhan kebutuhan *data scientist* (istilah lain dari *data analyst*) ini sudah diperkirakan oleh banyak pengamat sejak dua tahun lalu. Situs Infokomputer³, misalnya, menyatakan bahwa kebutuhan *data scientist* terus meningkat tetapi pasokan kurang. Industri perbankan, telekomunikasi, dan ritel merupakan industri yang “rakus” akan pengolahan data, sementara dunia perguruan tinggi kurang mampu memasok tenaga-tenaga siap kerja, khususnya yang memiliki keterampilan bidang teknologi informasi *plus* mengolah data.

Sejalan dengan kecenderungan peningkatan kebutuhan analisis tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi melansir pula kabar tentang kenaikan sektor informasi:

¹ <https://www.jobstreet.co.id/id/job/data-analyst-2262607>

² <https://www.aturduit.com/articles/5-profesi-teratas-yang-masih-banyak-dibutuhkan-di-indonesia/>

³ <https://infokomputer.grid.id/2015/02/fitur/wanted-data-scientist/2/>

Jakarta, Kominfo - Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi di Indonesia tercatat paling tinggi dalam triwulan II Tahun 2017. "Pertumbuhan tertinggi oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 10,88 persen, diikuti Jasa Lainnya sebesar 8,63 persen, dan Transportasi Pergudangan sebesar 8,37 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto, di Kantor BPS, Jakarta, Senin (07/08/2017) pagi.⁴

Walaupun pada umumnya kita menganggap bahwa sektor informasi dan komunikasi adalah sektor industri teknologi informasi (komputer), namun sebenarnya cakupan sektor ini cukup luas sampai ke jasa yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Sebagai contoh, Badan Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat, mendefinisikan "sektor informasi":

*The Information sector comprises establishments engaged in the following processes: (a) producing and distributing information and cultural products, (b) providing the means to transmit or distribute these products as well as data or communications, and (c) processing data.*⁵

Termasuk di dalam definisi butir c di atas itulah mereka yang disebut *data analyst*. Selain mereka, ada berbagai pegawai dan pekerja profesional yang mengelola dan mengemas informasi untuk berbagai keperluan. Misalnya *record manager*, ada dalam kategori ini. Kita tahu, perkembangan kebutuhan akan tenaga ini terus meningkat sejalan dengan semakin bergantungnya berbagai lembaga swasta maupun pemerintah pada dokumen-dokumen elektronik atau digital. Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISPII) pernah membahas perkembangan profesi dan kemungkinan standardisasinya⁶.

Secara lebih "tersembunyi" sebenarnya ada peningkatan kebutuhan berbagai profesi yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pertumbuhan pesat sektor informasi. Misalnya *data curator* yang semakin banyak dibutuhkan oleh produsen *cultural products* sebagaimana disebut di butir a definisi di atas. Sayang sekali belum ada kajian tentang kebutuhan ini di Indonesia. Namun secara logis kita dapat menduga bahwa pertumbuhan produksi film cerita maupun dokumenter serta berbagai bentuk produk media massa yang menggunakan teknologi komputer, akan melahirkan kebutuhan pegawai profesional yang dapat mengelola data digital dalam jumlah amat besar.

Demikian pula pemanfaatan teknologi informasi secara ekstensif dan intensif di bidang-bidang yang lebih "tradisional" seperti perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi, secara tidak langsung telah menjadikan lembaga-lembaga ini sebagai bagian dari produsen *cultural products* dalam bentuk digital. Sebab itu, pustakawan, arsiparis, dan deokumentalis di lembaga-lembaga tersebut sesungguhnya masuk dalam daftar kebutuhan sektor informasi yang terus meningkat di Indonesia.

Negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, sudah sejak lama mengelompokkan dan memantau perkembangan semua pekerja-pekerja yang terlibat di sektor informasi tersebut. Salah satu kajian yang dibuat oleh San José State University (SJSU) School of Information baru-baru ini membuat daftar 18 keahlian dan julukan (*title*) yang dibutuhkan oleh sektor informasi (diurutkan secara berabjad)⁷:

1. Application Developer

⁴ <https://kominfo.go.id/content/detail/10297/sektor-informasi-dan-komunikasi-tumbuh-1088-persen/0/berita>

⁵ <https://www.bls.gov/iag/tgs/iag51.htm>

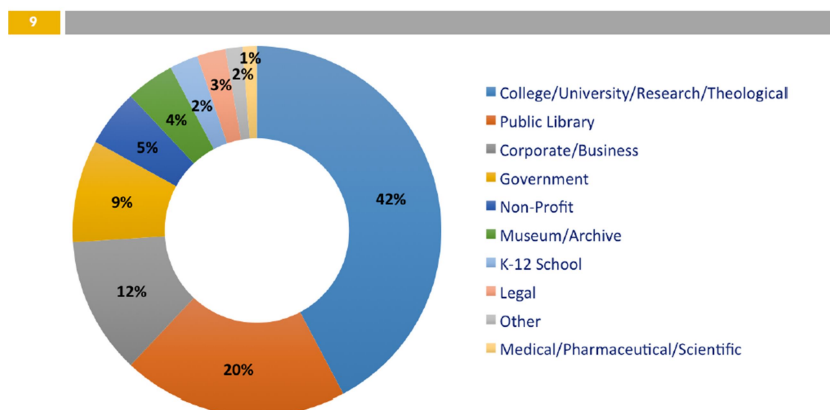
⁶ <https://www.isipii.org/artikel/record-specialist-dan-masyarakat-ekonomi-asean-mea-di-era-digital>

⁷ Lihat https://ischool.sjsu.edu/sites/default/files/content_pdf/career_trends.pdf (diunduh 26 Oktober 2017).

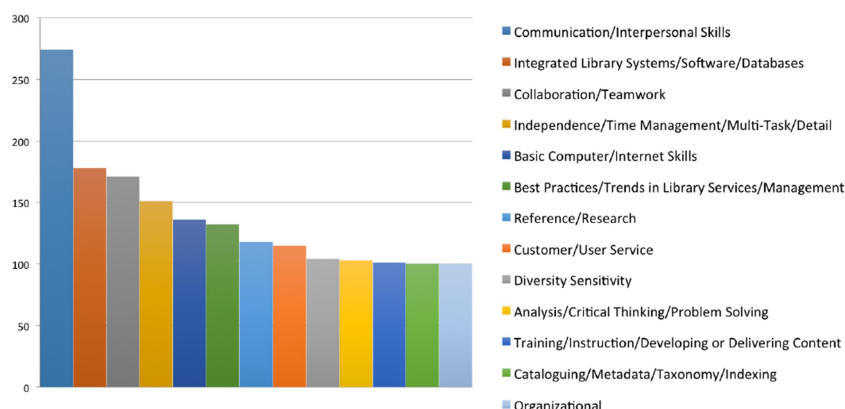
2. Archivist (Archive Assistant; Archival Digitization Specialist; Curator of Archives; Digital Archivist; Lead Processing Archivist)
3. Cataloging (Cataloger; Cataloging and Metadata Librarian; Music Cataloger; Principal Cataloger and Linked Data Strategist)
4. Collection Care Technician
5. Communications Specialist/Writer
6. Conflicts Analyst
7. Curator of Oral History
8. Digital Initiatives Program Manager
9. Document/Data Control Analyst
10. Emerging Technology Librarian
11. Information Technology Specialist
12. Knowledge Center Head of Operations
13. Librarian (Access Services Librarian; Business Librarian; Children's/ Youth Librarian; Library Page/Associate/Assistant/Technician; Medical Librarian; Reference Librarian; Special Collections Librarian; Technical Librarian)
14. Library Product Manager
15. Litigation Intelligence Analyst
16. Production and Marketing Specialist
17. Technology Hub Administrative Staff
18. Workflow Analyst/Programmer

Selain itu digambarkan pula lembaga-lembaga yang membutuhkan pegawai-pegawai profesional tersebut dan jenis keterampilan atau kompetensi yang paling dicari oleh mereka:

Employer Types



Skills Most Desired by Employers



Gambaran-gambaran di atas sedikit banyaknya menepis anggapan bahwa bidang perpustakaan dan kepastakawanan sedang menghadapi “kepunahan” di era yang didominasi teknologi informasi. Sekaligus, terlihat pula bahwa profesi-profesi “tradisional”, seperti pustakawan dan arsiparis, sedang mendapat tuntutan untuk berubah dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, jika tidak ingin tertinggal dan terabaikan di pasaran kerja.

Menarik pula dicatat bahwa *trend* dalam bidang informasi ini sudah sejak lama diprediksi oleh kalangan kepastakawanan, sehingga sebenarnya sudah sejak lama ada pembicaraan tentang profesi yang kemudian kita sebut *information professionals* atau (pekerja) profesional informasi.

Apa Yang dimaksud *Information Professionals*

Istilah “profesional informasi” datang dari bidang perpustakaan, sebelum digunakan oleh bidang-bidang lainnya. Diskusi tentang profesi ini sudah dilakukan sejak penghujung tahun 1970an, sejalan dengan merebaknya istilah dan gagasan tentang *information society* (masyarakat informasi). Dalam artikelnya, Lynch melacak perkembangan formalisasi profesi ini di Amerika Serikat ke tahun 1977, yaitu ketika Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi di University of Pittsburgh berhasil mendapatkan dukungan Pemerintah untuk mengadakan sebuah survei tentang kebutuhan profesi di masyarakat informasi. Definisi yang digunakan oleh proyek ini adalah:

An information professional may be differentiated from other professionals who also work with data by the fact that s/he is concerned with content (the meaning applied to symbols) and therefore with the cognitive/intellectual operations performed on the data by an end user. (1981, hal. 91).

Di Australia, awal-awal era 1980an merupakan masa berkembangnya profesi informasi. Menurut Lane (1985), sejak 1980 negeri ini sudah mengupayakan reorientasi dalam pendidikan ilmu perpustakaan. Pada tahun 1983, asosiasi profesi di Australia mengeluarkan laporan berjudul “A Review of Education for Library and Information Studies”, dan setahun berikutnya mereka mengadakan seminar nasional di kota Melbourne bertajuk “The Information Professional Conference”. Tidak berapa lama kemudian, asosiasi perpustakaan berganti nama menjadi Australian Library and Information Association (ALIA). Sejak itu dan sampai sekarang mereka menyatakan bahwa:

The phrase 'library and information professionals' refers to those members of the profession who have completed an entry-level qualification in library and information Di management at either Associate or Library Technician level⁸.

Di luar negara-negara Barat, Republik Rakyat Cina (RRC) merupakan salah satu negara yang dengan cepat mengembangkan profesi informasi, walaupun pada awalnya mereka menggunakan istilah *information scientist* dan menyelenggarakan pendidikan profesi melalui jalur teknologi informasi, bukan jalur perpustakaan. Menurut Li (1989) perkembangan profesi informasi berjalan bersamaan dengan munculnya *information science* secara formal di kancah akademisi RRC pada tahun 1980-an. Sejalan pula dengan pertumbuhan pendidikan teknologi informasi (komputer), kampus-kampus di RRC mulai mengadakan pendidikan khusus di bidang manajemen informasi pada awal tahun 1980an. Perguruan-perguruan tinggi seperti yang berorientasi teknologi, seperti Jilin Industrial University, North-West Electrical-Communication Engineering Institute, mengadakan pendidikan tingkat sarjana

⁸ <https://www.alia.org.au/about-alia/policies-standards-and-guidelines/alias-role-education-library-and-information-professionals>

dan pasca sarjana untuk bidang-bidang spesifik, seperti manajemen informasi dan temu-kembali informasi berbasis komputer. Belakangan, perkembangan di bidang teknologi ini “diserap” oleh sekolah-sekolah yang sebelumnya hanya mengajarkan ilmu perpustakaan.

Dengan latarbelakang perkembangan tahun 1980-an di atas lah, maka kemudian istilah profesional informasi dan pustakawan menjadi satu kesatuan. Apalagi kemudian di tahun 1990an dan memasuki tahun 2000an memang semakin kentara bahwa pekerjaan-pekerjaan profesional di bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi sudah tidak dapat lepas dari pemanfaatan teknologi informasi. Istilah “pekerja profesional informasi” (*information professionals*) sudah lebih diterima sebagai istilah generik atau umum, katimbang istilah yang lebih spesifik seperti *knowledge worker*. Saat ini definisi yang sering digunakan untuk menjabarkan profesi informasi ini antara lain adalah:

an individual working in a library, archive, museum, cultural heritage or information environment whose aim is to maintain, and often improve, access to the ever growing amount of information generated from within the culture and heritage industry, the media, and, increasingly, by the general public. (lihat misalnya Howard, et.al. 2016).

Sebagian definisi juga merujuk ke definisi dari Special Library Association di Amerika Serikat:

An Information Professional (“IP”) strategically uses information in his/her job to advance the mission of the organization. This is accomplished through the development, deployment, and management of information resources and services. The IP harnesses technology as a critical tool to accomplish goals. IPs include, but are not limited to, librarians, knowledge managers, chief information officers, web developers, information brokers, and consultants.

Information Professionals work for information organizations, which are defined as those entities that deliver information-based solutions to a given market. Some commonly used names for these organizations include libraries, information centers, competitive intelligence units, intranet departments, knowledge resource centers, content management organizations, and others. (<https://www.sla.org/career-center/about-information-professionals/>)

Acuan lainnya adalah CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals) di Inggris. Anggota mereka mencakup “...*information, knowledge management and library profession*”. Sebuah blog merinci gambaran keterampilan teknis yang kini semakin menjadi prasyarat dari anggota CILIP. Disebutkan di situ, seorang berprofesi informasi harus memahami 5 teknik: memanfaatkan media sosial, mengelola *cloud*, ikut memfasilitasi *makerspace*, berpartisipasi dalam menciptakan *apps*, dan berurusan dengan data dalam jumlah yang amat besar⁹.

Di Amerika Serikat, universitas-universitas besar mencanangkan program-program untuk menelurkan profesi informasi (lihat Information Professionals, 2016). Dari situ kita bisa melihat apa yang mereka maksud dengan profesi informasi. Salah satu pencanangan yang dibuat oleh Universitas North Carolina menyebutkan 5 ciri profesi informasi, yaitu:

1. Mitra dalam upaya menghasilkan dan menghimpun informasi, mereka menjadi bagian dari riset, data mining, atau tim perancang. Kemampuan profesi informasi dalam mengelola informasi secara akurat dan baik adalah sumbangsih terbesar mereka.
2. Memunculkan informasi (dari data), mencernakan atau menyerapkannya dari luar (*data ingestion*), mengelola, dan mengevaluasi informasi. Ini dilakukan dengan menggunakan pangkalan data yang tersebar dan dengan mengarahkan aliran data ke pengguna yang

⁹ lihat <https://www.cilip.org.uk/blog/5-technical-skills-information-professionals-should-learn>

sesuai. Pemahaman mereka tentang *universal access* dapat menghasilkan indeks dan ontologi yang baik, dan prinsip ketata-gunaan (*stewardships*) membuat mereka sangat peduli pada struktur data yang baik dan benar.

3. Menghargai keterbukaan dalam berbagi informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi.
4. Menjadi peserta atau bahkan pemrakarsa proses penggunaan-kembali data dan informasi untuk keperluan pengambilan keputusan, pembelajaran, maupun re-kreasi. Dalam konteks kemasyarakatan, pekerja informasi cenderung aktif dalam mengembangkan kebiasaan mencari dan menggunakan informasi secara akurat, menjaga prinsip *provenance*, dan sangat membantu upaya memilah, mensintesa, melengkapi, maupun menyarikan informasi.
5. Terbiasa dengan tata-guna pengetahuan (*knowledge stewardships*) dan peran ini semakin penting di tengah membanjirnya informasi. Mereka terbiasa memastikan bahwa kekeluargaan akses harus dibarengi dengan tata-guna, agar informasi dapat terus bermanfaat sampai kapan pun. Di tingkat data, ada *data governance* yang berada di tingkat kebijakan/prosedur pemanfaatan data, lalu ada *data stewardships* yang langsung berkaitan dengan koordinasi dan implementasi taktis di sebuah sistem informasi organisasi. Dengan kata lain tata-guna data erat hubungannya dengan kebijakan penggunaan dan keamanan data. Profesi informasi seringkali berada di antara bagian TI dan bagian bisnis di sebuah organisasi.

Apa Bedanya Dari Pustakawan?

Di dokumen Universitas North Carolina yang saya kutip di atas juga disebutkan bahwa profesi informasi masih memegang teguh beberapa prinsip yang sudah berkembang sebelumnya dalam profesi pustakawan dan tradisi kepastakawanan, yaitu:

- Pengorganisasian informasi (*organization of information*)
- Keterbukaan dalam akses (*Universal access*)
- Kerjasama dan pengetahuan bersama (*Collaboration*)
- Kemerdekaan berpikir (*Intellectual freedom*)
- Pembelajaran mandiri (*Self-directed learning*)
- Ketata-gunaan (*Stewardship*)

Namun ada kesadaran bahwa beberapa dari nilai tersebut di saat ini kadang bertentangan dengan karakter organisasi yang mencari keuntungan. Isu yang kemudian berkembang adalah: apakah nilai ini akan dipertahankan sebagaimana adanya dalam pendidikan walaupun lulusan nanti berhadapan dengan realita yang bertolakbelakang?

Dari sisi pandang pendidik, nilai-nilai tradisional dalam kepastakawanan tetap mengandung tiga pilar penting: interaksi antara manusia, informasi, dan teknologi. Lalu ketiga pilar ini menopang proses yang biasa disebut sebagai daur hidup informasi (*information life cycle*). Pustakawan dan Kepustakawanan sudah amat terbiasa dengan ketata-gunaan dari informasi yang sudah jadi, sementara daur hidup informasi yang sekarang hendak diurus mencakup penciptaan, pengelolaan, pengiriman/pemindahan, penggunaan/penggunaan-kembali, dan preservasi.

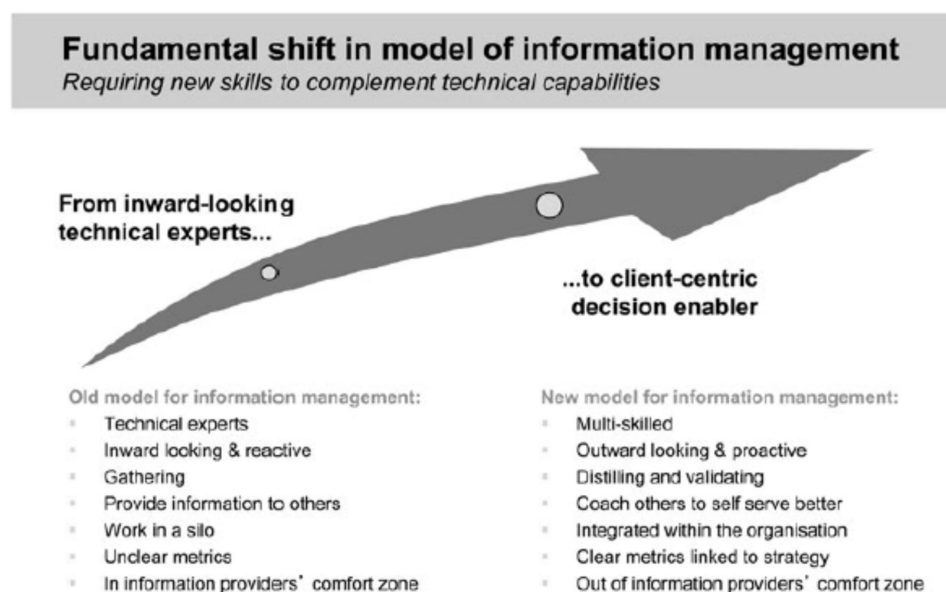
Penggunaan teknologi informasi di perpustakaan saat ini juga sudah sangat intensif sehingga sebenarnya nyaris tidak ada lagi perpustakaan yang tidak bersentuhan – langsung maupun tidak langsung – dengan komputer dan Internet. Ini menyebabkan munculnya konsep “kepastakawanan digital” (*digital librarianships*) yang oleh DelRosso dan Lampert digambarkan sebagai wujud kepastakawanan tradisional yang tetap berperan dalam perkembangan teknologi. Biar bagaimana

pun perpustakaan digital tetap memiliki aspek ruang-fisik dan interaksi antar-pribadi, dua hal yang selama ini memang dalam pengelolaan pustakawan. Di dalam lingkup *information ecosystem* saat ini, pustakawan digital tetap diharapkan berperan memudahkan masyarakat mengakses dan memanfaatkan berbagai sumber informasi.

Dari sisi pandang komputerisasi, Twidale dan Nichols (2009) secara sederhana menggambarkan kepusakawanan digital sebagai “*the knowledge and skills needed to design and implement digital information services*”. Salah satu kemampuan baru yang diharapkan dapat dilakukan pustakawan digital adalah apa yang disebut *incremental tailoring* yang melibatkan proses pengubahan-pengubahan kecil pada aplikasi komputer untuk tujuan-tujuan khusus. Seringkali hal ini hanya menyangkut perubahan *interface* tapi tak menutup kemungkinan proses yang lebih mendasar. Walaupun tidak diharapkan menguasai *programming* secara aktif, setidaknya seorang pustakawan digital memahami proses dan tata-kerja pemrograman komputer.

Selain itu, sebagai bagian dari masyarakat yang juga sudah sangat intensif menggunakan komputer dan Internet, maka mau tidak mau kepusakawanan mengalami re-orientasi. Ini tidak berarti bahwa prinsip-prinsip kepusakawanan sebagaimana diulas di atas ditinggalkan, melainkan justru sebaliknya tetap menjadi pondasi bagi peran perpustakaan digital di masyarakat. Misalnya, perpustakaan tetap dapat berperan dalam hiruk pikuk media sosial entah sebagai fasilitator (Schrier, 2011) di mana pustakawannya terlibat aktif menawarkan jasa rujukan, atau menjadi pengimbang bagi ketersediaan informasi-informasi yang menyebarluas tanpa rujukan dan cenderung mengandung *hoax*.

Dari sisi pandang manajemen informasi, Lord (2014) pernah meringkas perubahan karakter profesi ini dengan gambar sebagai berikut:



Dalam artikel tersebut Lord menyebut pula semakin pentingnya kemampuan berkomunikasi, baik secara personal maupun lewat teknologi, bagi setiap pekerja informasi profesional termasuk manajer rekod dan pustakawan yang selama ini dikenal sebagai “orang di belakang meja”. Walau bagaimana pun, perkembangan teknologi dan Internet tetap memerlukan hubungan antar pribadi terutama jika anggota masyarakat yang kita layani mengalami kesulitan akibat *information overload*. Di tingkat organisasi/kantor, pustakawan dan profesional informasi diharapkan dapat membantu kolega menemukan informasi yang lebih baik/berguna katimbang informasi yang tersedia meluas di Internet.

Perubahan-perubahan orientasi dan tantangan-tantangan baru akibat aplikasi komputer ini kemudian juga “memaksa” pembedaan atau pemisahan profesi pustakawan dari pengkhususan di bidang manajemen rekod, sehingga memunculkan *trend* pembentukan asosiasi baru. Misalnya, secara internasional dikenal adanya ARMA (<http://www.arma.org/who-we-are>) yang merupakan perhimpunan bagi “...records and information managers, information governance professionals, archivists, corporate librarians, imaging specialists, legal professionals, IT managers, consultants, and educators”. Di Australia ada asosiasi untuk manajer rekod, yaitu RIMPA (<http://rimpa.com.au/>) dengan cabang di Selandia Baru dan Malaysia. Semula (sampai dengan tahun 2011) asosiasi ini bernama Record Management Association of Australia.

Jelaslah bahwa berbagai pembedaan dan perubahan dalam karakter pekerjaan di atas dipengaruhi oleh kehadiran komputer dan teknologi informasi lainnya yang mengubah pula keseluruhan lanskap sosial dan budaya di setiap masyarakat. Secara lebih spesifik, perubahan itu juga ditimbulkan oleh semakin sentralnya peran informasi dalam bisnis dan komodifikasi berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini lah kepustakawanan dan pustakawan yang lahir dari prinsip-prinsip non-profit menemukan tantangannya.

Pendidikan Profesi dan Ilmu Pendukungnya

Perubahan-perubahan prinsipil maupun teknis sebagaimana dibahas di bagian-bagian sebelumnya memaksa pula sekolah-sekolah yang selama ini mendidik pustakawan untuk melakukan perombakan besar-besaran. Di Australia, 12 universitas berembug dari tahun 2009 sampai 2012 untuk menghasilkan apa yang mereka sebut kerangka pendidikan profesi informasi (Patridge dan Yates, 2012). Dalam rekomendasi mereka antara lain disebutkan perlunya koordinasi dengan jurusan komputer dan manajer rekod, serta dengan pengguna lulusan (lapangan kerja). Australia kemudian mempunyai strategi pendidikan khusus untuk profesi informasi.

Di dalam strategi tersebut, antara lain ada dua anjuran penting bagi universitas-universitas yang menyelenggarakan pendidikan profesi informasi, yaitu:

- Pertama, anjuran untuk mempermudah perpindahan jalur dari vokasional ke profesional sehingga memudahkan perkembangan karir di lapangan.
- Kedua, anjuran untuk membuat program pendidikan yang memungkinkan peserta didik memiliki kemampuan generik di dua atau lebih bidang informasi (misalnya perpustakaan dan kearsipan) ditambah dengan kemampuan-kemampuan inovatif dalam teknologi informasi. Dengan begitu, lulusan tetap dapat menyandang gelar pustakawan atau arsiparis, tetapi mampu memenuhi permintaan pasar kerja berbagai bidang yang berkaitan dengan informasi.

Selain anjuran-anjuran spesifik yang berkaitan dengan kurikulum dan pengajaran, desakan untuk mengubah orientasi keilmuan juga menguat. Ini dilakukan dengan mendesak Pemerintah Australia untuk lebih banyak membantu penelitian dan kajian khusus bidang informasi yang memungkinkan pengembangan Ilmu Perpustakaan dan Informasi secara lebih adaptif dengan perkembangan teknologi.

Di negara lain memang sudah muncul fenomena iSchools untuk menjawab tantangan-tantangan baru di bidang informasi ini. Sebuah survei (Chakrabarti dan Mandal, 2017) menunjukkan ada 57 iSchools di dunia sebagaimana terlihat di tabel berikut:

Geographical distribution of iSchools in the World

Name of the States	Number of iSchools	Percentage
Australia	02	3.51
Brazil	01	1.75
Canada	03	5.26
China	02	3.51
Denmark	01	1.75
Finland	01	1.75
Germany	01	1.75
Ireland	01	1.75
Japan	01	1.75
Netherlands	01	1.75
Norway	01	1.75
Portugal	02	3.51
Singapore	01	1.75
South Korea	04	7.01
Spain	01	1.75
Sweden	01	1.75
Turkey	01	1.75
Uganda	01	1.75
The United Kingdom	04	7.01
The United States	27	47.37
Total	57	100

Sebagian besar iSchool diinisiasi oleh sekolah-seolah perpustakaan, namun tak kurang juga yang menjadi bagian dari departemen komputer, media, atau komunikasi. Ini memperkuat citra multi dan interdisipliner dari program-program studi informasi.

Fenomena iSchool ini dimulai sejak 1988 oleh *the Gang of Three* yang terdiri dari dekan-dekan di Universitas Pittsburg, Drexel, dan Syracuse, dan kemudian ditambah dari Rutgers sehingga menjadi *the Gang of Four*. Semua universitas ini menawarkan *graduate program* untuk Ilmu Perpustakaan dan Informasi (atau Library and Information Science dalam bahasa Inggris), selain juga program *undergraduate* di bidang komputer, telekomunikasi, jurnalistik, dan sebagainya. Empat dekan pemrakarsa iSchool ini berembug untuk mengkonsolidasi sisi *Information Science* sehingga mengeluarkan konsep iSchool. Pada 2003 jumlah universitas yang ikut menjadi 10 dan sejak itu terus bertambah sampai kemudian meluas ke luar Amerika Serikat.

Fenomena iSchool dapat dijadikan objek kajian tersendiri dalam kaitannya dengan perkembangan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, tetapi saya tidak punya cukup ruang maupun waktu untuk melakukannya dalam diskusi ini. Namun ada baiknya kita juga membaca hasil pertemuan ilmiah tahun 2011 yang diadakan di PDII-LIPI¹⁰, di mana kita membahas secara sangat komprehensif tentang Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Saya tidak akan mengulas isi prosiding secara detil. Beberapa hal yang relevan untuk dikutip di sini ada di bagian epilog yang saya tulis.

Pertama, adalah penegasan tentang karakter Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Saya menulis bahwa ilmu ini mengandung karakter interdisipliner karena setidaknya terdiri atas empat rumpun besar, yaitu:

¹⁰ Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – LIPI (2011). Information for Society : Scientific Points of View. Prosiding Seminar Ilmiah dan Lokakarya Nasional, Jakarta 20-21 Juli

- matematik-logika (diwakili oleh ilmu statistik, ilmu komputer, statistik-linguistik),
- kognisi-perilaku (diwakili oleh psikologi),
- interaksi antarmanusia (diwakili oleh sosiologi), dan
- pemaknaan (diwakili oleh humaniora).

Namun, ilmu informasi juga dapat dilihat sebagai transdisipliner karena kolaborasi dan penyemaian-silang berbagai teori untuk tujuan-tujuan penggabungan konsep baru. Konsep transdisipliner ini dapat dikaitkan dengan apa yang disebut Mode-2 dalam sosiologi ilmu yang –alih-alih menyoal ketertiban ilmiah dan disiplinnya—lebih menekankan pada kegunaan ilmu dalam memberikan solusi terhadap dua masalah sentral di masa kini, yaitu:

1. Kesenambungan peradaban sejak ditemukannya buku sampai sekarang, yang selalu berkisar pada tugas institusi perpustakaan dan yang semacamnya dalam memelihara kelancaran transformasi informasi menjadi pengetahuan bersama.
2. Persoalan di masyarakat, baik itu berupa budaya baca dan keterbelakangan sosial, maupun internet dan kesenjangan digital, pada akhirnya merupakan persoalan-persoalan praktis yang dapat direntang sehingga menyangkut tidak hanya teknologi (buku, jaringan komputer), tetapi juga ekonomi dan hukum atau kebijakan. Membaca adalah persoalan praktis, sama halnya dengan akses ke internet, tetapi keduanya merupakan persoalan ekonomi selain juga persoalan kognitif dan teknologis. Kejahatan di ruang saiber maupun penelantaran kelompok masyarakat oleh pemerintah yang otoriter juga sama-sama persoalan praktis yang menyangkut akses ke informasi, selain juga politik dan budaya. Persoalan-persoalan inilah yang perlu didekati secara transdisipliner dan berpotensi menjadi kajian-kajian IP&I jika ingin mempertahankan dan mengembangkan sifat transdisipliner. Tentu saja, implikasinya adalah dalam bentuk penelitian-penelitian akademik yang harus semakin banyak merujuk ke permasalahan nyata di masyarakat dan semakin melibatkan komunikasi ilmiah antar-ilmuwan dari berbagai disiplin. Di hal yang terakhir inilah kiranya kita di Indonesia perlu melakukan lebih banyak lagi perbaikan.

Diperlukan lebih banyak waktu untuk membahas secara khusus perkembangan ilmu yang dapat mendukung profesi informasi, tetapi untuk saat ini kita dapat mengatakan bahwa karakter transdipliner seperti yang saya uraikan di atas akan terus mewarnai perkembangan Ilmu Perpustakaan dan Informasi.

Persoalannya adalah: karakter tersebut mensyaratkan kemauan untuk “membuka diri” di kalangan ilmuwan yang merasa diri mereka pengusung Ilmu Perpustakaan dan Informasi, dan juga mensyaratkan pengakuan dari disiplin ilmu lain terhadap Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Keduanya merupakan persoalan yang masih menggayuti kita sampai kini.

Profesi Informasi di Indonesia

Saya belum menemukan definisi maupun kesepakatan baku di Indonesia tentang profesi ini, walaupun sebenarnya ada beberapa upaya yang sudah dilakukan, khususnya oleh akademisi di bidang perpustakaan. Kebetulan saya terlibat langsung dalam upaya tersebut, dan dalam catatan saya ada beberapa langkah penting yang pernah dilakukan di Indonesia:

1. Pada tahun 2000, saya lupa tanggalnya, saya menggagas sebuah forum diskusi dan pakar yang kemudian bernama Inisiatif Manajemen Pengetahuan Indonesia, disingkat IMPI. Enam orang amat berperan dalam perwujudan organisasi pakar pertama di Indonesia untuk jenis ini, yaitu Iris Tutuarima dari Bank Indonesia, Ningky Moenir dari LPPM, Utami Hariyadi

(waktu itu di PriceWaterhouse), Elly Julia (waktu itu pustakawan LPPM), dan Harkrisyati Kamil (waktu itu masih aktif dengan British Council). Salah satu program IMPI adalah mendorong terbentuknya profesi informasi. Forum ini sempat berkibar sampai 2007 dan pernah disejajarkan dengan Knowledge Management Society Indonesia, Knowledge Indonesia, Knowledge Management Resource Group (KMRG) dan organisasi lainnya dalam peran memperkenalkan dan menggiatkan program-program manajemen pengetahuan di organisasi-organisasi Indonesia. Semula IMPI juga ingin didorong untuk menjadi program studi di Universitas Indonesia, tetapi tidak jadi karena saya keburu diberhentikan dari Jurusan Ilmu Perpustakaan.

2. Setahun kemudian, pada tanggal 18 September 2001, di sebuah acara bertajuk “Kuliah Perdana Program Studi Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan” (rutin dilakukan di awal-awal pembentukan program S2 Jurusan Ilmu Perpustakaan), saya menyampaikan sebuah makalah berjudul *Manajemen Pengetahuan Dan Profesional Informasi : Harapan, Kenyataan, dan Tantangan*. Di makalah itu saya menguraikan panjang lebar peran profesi-profesi informasi dalam konteks manajemen informasi.
3. Lalu pada tanggal 26 Agustus 2002 saya ditugasi Jurusan Ilmu Perpustakaan untuk membuat sebuah seminar yang kemudian berjudul “Quo vadis Ilmu dan Profesi Informasi di Indonesia”. Pembicaranya adalah Prof. Surjanto Puspwardojo yang membahas falsafah informasi, Rila Mandala, Ph.D yang membahas penelitian temu kembali informasi, Sulistyobasuki (waktu itu belum profesor) yang membahas sejarah perkembangan ilmu dan pendidikan perpustakaan di Indonesia, Utami Hariyadi yang membahas manajemen data digital, dan Hendro Wicaksono yang membahas pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi bagi lulusan jurusan perpustakaan. Saya jadi moderator. Sayang sekali tidak terlacak kemana gerangan prosiding seminar ini.
4. Sejak 2002 itu saya aktif menganjurkan berdirinya asosiasi profesi yang berciri informasi, tetapi tak banyak yang mengikutinya, kecuali pada tahun 2006 ketika dua organisasi berdiri. Pertama adalah Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah Indonesia yang kemudian diketuai oleh Hanna Chaterina-George. Kedua adalah Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia. Saya sempat dimintai pendapat untuk mendirikan asosiasi profesi informasi di kalangan teman-teman yang bekerja di media massa, namun saya tidak pernah mendengar lagi kabar mereka.

Saya tidak mengikuti perkembangan selanjutnya di Indonesia, namun kira-kira memang sudah ada gambaran umum tentang profesi ini sebagai semacam “payung” yang melibatkan pustakawan, arsiparis, dokumentalis, manajer rekod, dan sebagainya. Di beberapa kurikulum jurusan perpustakaan juga sudah ada pencantuman istilah profesi informasi. Saya belum berkesempatan mengkaji pemaknaan dan definisi istilah-istilah itu, mudah-mudahan akan segera ada yang melakukannya.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah perkembangan dari teman-teman di bidang komputer yang juga punya profesi-profesi baru. Beberapa profesi yang perlu mendapat perhatian adalah ahli informatika sebagaimana tergabung dalam Ikatan Ahli Informatika Indonesia (<https://www.iaii.or.id/>), analis sistem informasi sebagaimana yang tergabung di Asosiasi Sistem Informasi Indonesia (<http://www.asii.or.id/>), dan auditor sistem informasi sebagaimana yang tergabung dalam Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia (<http://iasii.or.id/tentang-iasii/>).

Saya menduga ada beberapa persamaan dalam karakter profesi-profesi tersebut, dan mungkin juga ada beberapa karakter yang beririsan dengan profesi informasi. Namun ini di luar kemampuan saya dalam mengamati perkembangannya. Mudah-mudahan ada pihak-pihak yang berkepentingan,

misalnya asosiasi-asosiasi profesi dan penyelenggara pendidikan profesional di suatu saat akan melakukan kajian mendalam tentang hal ini dan bersama-sama menjawab berbagai isu tentang profesional informasi ini.

Daftar Rujukan

- Chakrabarti, A. dan Mandal, S. (2017). The iSchools: A study. *Library Philosophy and Practice*. 1537.
- DelRosso, J. & Lampert, C. (2013). *So You Want to Be a Digital Librarian – What Does That Mean?* Berkas elektronik diunduh dari <http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2013&context=articles> pada 26 Oktober 2017.
- Howard, K.; Partridge, H.L., Hughes, H.E.; Oliver, G. (2016). *Passion trumps pay: A study of the future skills requirements of information professionals in galleries, libraries, archives and museums in Australia*. *Information Research*, 21(2).
- Informational Professionals 2050: Educational Possibilities and Pathways* (2012). Editor Gary Marchionini dan Barbara B. Moran School of Information and Library Science University of North Carolina at Chapel Hill – prosiding dari Information Professionals 2050, Juni 4-5, 2012 di University of North Carolina at Chapel Hill.
- Lane, N.D. (1985). Education for Information Professionals in Australia. *Journal of Education for Library and Information Science*, 25 (4), hal. 326-332.
- Li, T. (1989). The Education of Information Professionals in China: Changes and Trends. *Journal of Education for Library and Information Science*, 29 (3), hal. 228-231
- Lord, S. (2016). Closing the Gap: the five essential attributes of the modern information professional. *Legal Information Management*, 14 (2014), hal. 258–265
- Lynch, M.J. (1981). "Information Professionals": Who and Where? *American Libraries*, Vol. 12, No. 2 hal. 91.
- Partridge, H.; Yates, C. (2012). *A Framework for the education of the information professions in Australia*. *Australian Library Journal* 61 (2), hal. 81-94.
- Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – LIPI (2011). *Information for Society : Scientific Points of View*. Prosiding Seminar Ilmiah dan Lokakarya Nasional, Jakarta 20-21 Juli
- Schrier, R.A. (2011). Digital Librarianship & social media: the digital library as conversation facilitator *D-Lib Magazine*, 17 (8) <http://www.dlib.org/dlib/july11/schrier/07schrier.html>